



Membangun Ekosistem Kota Cerdas

Banda Aceh Kota Pertama Masuk Program Smart City Indonesia

03



**Zakat Zaman Now,
Lebih Mudah Lebih
Transparan**

Baitul Mal Banda Aceh semakin memudahkan masyarakat untuk menunaikan zakat mereka lewat aplikasi berbasis android. Sebuah terobosan penting dalam ekosistem kota cerdas.

05



**Menabuh Genderang
Perang Riba**

Banyak masyarakat yang belum memahami bahaya riba. Program PT Mahirah Muamalah Syariah dan Ikatan Siswa Kader Dakwah Aceh ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya berbisnis secara syari'i.

08



**Arah Baru
Nahkoda Lama**

T Novizal Aiyub kembali dipercaya memimpin Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy. Seremoni pelantikan pria berjenggot ini dilaksanakan oleh Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin di Balai Kota, Jumat pekan lalu.

◆◆◆ SALAM REDAKSI**Bustami**

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

Membangun Ekosistem Digital

BAGI Banda Aceh, gaya hidup digital bukan barang baru. Syahdan, Pemerintah Kota Banda Aceh menerapkan sebuah sistem penghitungan kinerja pegawai negeri sipil di jajarannya berbasis aplikasi yang dinamai e-Kinerja.

Sistem ini lantas diikuti oleh banyak pemerintah daerah. Mulai dari perintah daerah di Aceh hingga di hampir seluruh nusantara. Pemerintah Kota Banda Aceh tak pernah kehabisan "tamu" yang ingin melihat langsung pengaplikasian e-Kinerja untuk menerapkan penemuan ini ke daerah mereka.

Seiring perjalanan waktu, sistem-sistem baru berbasiskan digital muncul di pemerintahan. Semua bermuara untuk memudahkan pelayanan publik. Mulai dari pendataan kependudukan, layanan sosial hingga zakat. Semua menjadi lebih mudah dan transparan karena bisa dikendalikan dalam genggaman; lewat telepon cerdas.

Untuk itu, pemerintah kota bersiap. Karena untuk membangun ekosistem digital ini memerlukan pengalihan. Mulai dari basis jaringan hingga sumber daya manusia. Beberapa waktu lalu, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh menginisiasi lahirnya Forum Satu Data Kota Banda Aceh 2019.

Forum satu data ini merupakan salah satu forum yang dibentuk dengan landasan Surat Keputusan Walikota Nomor 2 Tahun 2019 Tanggal 4 Januari 2019 Tentang Pembentukan Forum Satu Data Kota Banda Aceh dan Surat Keputusan Walikota Nomor 3 Tahun 2019 Tanggal 4 Januari 2019 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Data Kota Banda Aceh Tahun 2019.

Kami berharap forum ini dapat menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor. Semua, tentu saja, untuk menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap sektor untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah Kota Banda Aceh.

Ke depan, tentu kita berharap talenta muda Banda Aceh, baik yang duduk di pemerintahan maupun swasta, mampu menghadirkan inovasi baru yang menjawab kebutuhan masyarakat. Apalagi, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman memberikan perhatian penuh terhadap hal ini. Tentu saja kita berharap agar Banda Aceh benar-benar siap menjadi tempat dan berkembangnya ekosistem digital.

◆◆◆ REDAKSI

PENERBIT Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh | **PEMBINA** Walikota Banda Aceh - Wakil Walikota Banda Aceh I | **PENGARAH** Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh **PENANGGUNG JAWAB** Bustami | **WAKIL PENANGGUNG JAWAB** T. Taufik Mauliansyah | **DEWAN REDAKSI** Jailani - Maulidar - Jauhari | **PEMIMPIN REDAKSI** Rahmat Kadafi | **WAKIL PEMIMPIN REDAKSI/REDAKTUR PELAKSANA** Mahdi Andela | **SEKRETARIS REDAKSI** Raja Maghfirah | **REPORTER** A. Sabur | **STAF REDAKSI** Cut Ahmad Putra - Azwar - Afifuddin - Teja Sukmajaya - Asna Mardhia - Izzan - Muhamrami - Devi Irawan - Iin Muhaira | **FOTOGRAFER** Ratno Sugito | **LAYOUTER** Mulyadi

Redaksi menerima tulisan berupa opini dan surat pembaca, sesuai dengan misi Info Banda Aceh, kirimkan beserta foto tanda pengenal melalui surel (email): infobandaacehkota@gmail.com

Zakat Zaman Now, Lebih Mudah Lebih Transparan

Baitul Mal Banda Aceh semakin memudahkan masyarakat untuk menuaikan zakat mereka lewat aplikasi berbasis android. Sebuah terobosan penting dalam ekosistem kota cerdas.

ZAKAT adalah instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karenanya, penting bagi Pemerintah Kota Banda Aceh merawat kepercayaan masyarakat dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat yang terkumpul lewat Baitul Mal Kota Banda Aceh.

“Apalagi selama Ramadan, penerimaan zakat meningkat dibandingkan dengan bulan-bulan lain. Penting bagi kami untuk mengelola hal ini secara transparan dan tepat,” kata Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh, Safwani Zainun, di ruang kerjanya, beberapa waktu yang lalu. “Pengumpulan zakat yang profesional dan transparan akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa kewajiban mereka dikelola dengan benar dan bermanfaat bagi pembangunan masyarakat.”

Peningkatan jumlah penerimaan zakat ini seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban mereka. Mereka yang membayar zakat, kata Safwani, mulai anak kecil hingga orang tua, baik laki-laki maupun perempuan. Nilai lebih yang dirasakan selama Ramadan, kata Safwani, kepedulian masyarakat dan empati atas kesusahan muslim yang lain semakin tinggi. Dari tahun ke tahun, jumlah zakat yang diterima Baitul Mal Kota Banda Aceh terus meningkat.

“Zakat merupakan bukti konkret dari sikap kepedulian. Zakat sangat potensial sebagai solusi mengetaskan kemiskinan. Bahkan zakat hendaknya dapat menjadi solusi dan terobosan jitu untuk menurunkan angka kemiskinan,” kata Safwani.

Untuk mempermudah proses pendataan para muzakki (pemberi zakat), Baitul Mal Kota Banda Aceh saat ini memanfaatkan aplikasi Sistem Manajemen informasi BAZNAS (SIMBA). Data yang dihimpun dalam aplikasi ini dapat langsung diunggah dan dilacak. Safwani berharap aplikasi ini dapat menjadi model bagi Baitul Mal di daerah-daerah yang lain.

“Apalagi, Wali Kota Aminullah tengah membangun ekosistem smart city. Aplikasi ini merupakan salah satu jawa-



ban dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik agar lebih transparan. Di sisi lain, hal ini akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kota dan pengelolaan zakat oleh Baitul Mal,” kata Safwani.

Dengan sistem yang terintegrasi secara online dan saling terhubung ini, Safwani juga berharap nilai kepercayaan masyarakat menyisihkan uang untuk berzakat dan sedekah bisa tinggi dan dapat dimanfaatkan secara maksimal kepada sesama yang membutuhkan.

Aplikasi ini memudahkan proses penerimaan ZIS pada bagian pengumpulan serta pelaporannya. Di masa mendatang, lewat penyempurnaan aplikasi, muzakki dapat melihat keadaan transaksi zakat yang mereka bayarkan.

Di seluruh Aceh, selain Banda Aceh, hanya sedikit daerah yang aktif menggunakan SIMBA. Baitul Mal Kota Banda Aceh memiliki 15 tenaga profesional penyuluh dan pengumpul zakat yang tersebar di seluruh kecamatan se-Kota Banda Aceh. Penyuluh dan Pengumpul Zakat siap menjemput zakat serta bersedia memberikan konsultasi tentang zakat

kepada setiap muzakki.

“Aplikasi ini untuk sementara hanya tersedia di google play, yakni untuk pengguna telepon cerdas berbasis android. Ke depan, kami akan terus mengembangkan untuk basis telepon cerdas yang lain, seperti IOS. Intinya, kami berharap agar seluruh masyarakat bisa lebih mudah memanfaatkan aplikasi ini dan lebih mudah untuk menunaikan kewajiban mereka,” kata Safwani.

Pilihan membayar zakat secara *online* ini seperti menjadi keharusan. Menurut Safwani, banyak masyarakat tak lagi membayarkan zakat dengan cara konvensional. Bahkan berdasarkan data Baznas, pembayaran zakat digital naik 12 persen mulai 2016, sejak banyak platform serta *e-commerce* yang memberikan layanan untuk menunaikan zakat mereka. Pembayaran zakat melalui aplikasi ini diperkirakan terus meningkat di tahun-tahun mendatang.

Kemudahan ini bahkan mendorong generasi milenial untuk membayar zakat. Baik itu zakat mal, zakat penghasilan atau zakat fitrah. “Jadi, aplikasi ini sangat memudahkan mereka yang belum sempat membayar zakat. Pilihan ada di tangan mereka. Tinggal klik,” kata Safwani.

Langkah Diskominfotik untuk Forum Satu Data

Forum ini merupakan bagian dari upaya penuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat. Tetap mengacu pada aturan perundang-undangan.

BANDA ACEH - Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh menginisiasi lahirnya Forum Satu Data Kota Banda Aceh Tahun 2019. Forum ini akan mendorong

ketersediaan data dari pemerintah kota untuk disajikan kepada khalayak ramai.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh, Bustami, dalam sebuah pertemuan di Aula Madani Center, mengatakan Forum Satu Data ini dibentuk berlandaskan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2019 Tanggal 4 Januari 2019 tentang Pembentukan Forum Satu Data Kota Banda Aceh dan Surat Keputusan Walikota

Nomor 3 Tahun 2019 Tanggal 4 Januari 2019 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Data Kota Banda Aceh Tahun 2019.

“Kami berharap Forum ini menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor dan menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap sektor untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah Kota Banda Aceh,” kata Bustami.

Bustami berharap dengan hadirnya forum satu data ini hendaknya dapat mendukung visi misi Pemerintah Kota Banda Aceh 2017-2022 yaitu Mewujudkan Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah. Lewat forum ini, pengambilan kebijakan di Pemerintah Kota Banda Aceh, atau instansi lain yang ingin masuk ke Banda Aceh, dibuat berdasarkan data yang akurat.

Menurut Bustami, forum ini diperlukan untuk menciptakan ketersediaan data pemerintah yang akurat, terbuka, dan interoperable. Satu Data memiliki tiga prinsip utama yaitu, satu standar data,

satu metadata baku, dan satu portal data. Dengan demikian, pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antarinstansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat.

Forum ini menggunakan prinsip data terbuka dalam merilis data. Data tersedia dalam format terbuka yang mudah digunakan kembali, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan.

Data yang tersaji, kata Bustami, dapat digunakan secara bebas, dimanfaatkan, dan didistribusikan kembali oleh siapapun tanpa syarat, kecuali dengan mengutip sumber dan pemilik data. Selain itu, kata Bustami, seluruh data yang dipublikasikan harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses publikasinya juga sesuai peraturan yang berlaku. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat jenis data yang dikecualikan dan tidak boleh dirilis. **A.SABUR**



Membangun Ekosistem Kota Cerdas

Banda Aceh Kota Pertama Masuk Program Smart City Indonesia

Pengembangan Banda Aceh sebagai kota cerdas akan menjadikan layanan publik semakin mudah dan sederhana. Plus meningkatkan pendapatan asli daerah.

SEBUAH kesepakatan penting dicapai Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman. Pertengahan Mei lalu, orang nomor satu di Banda Aceh itu menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang implementasi Gerakan Menuju 100 Smart City. Langkah ini akan mengubah pelayanan publik di Banda Aceh menjadi lebih mudah dan sederhana.

Penandatanganan nota kesepahaman itu dilakukan langsung oleh Wali Kota Aminullah Usman bersama Direktur Jendral Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Samuel Abrijani Pangerapan di Taman Sari, Jakarta.

“Gerakan menuju 100 Smart City ini dilakukan untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam ekosistem *smart city*,” kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh, Bustami yang ikut menyaksikan penandatanganan ini.

Ada banyak keuntungan yang bisa dipetik pemerintah ko-



ta dari nota kesepahaman ini. Menurut Bustami, hal ini juga akan menjawab permasalahan sekaligus mendorong potensi di daerah masing-masing sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pengembangan *smart city*.

“Penandatanganan nota kesepahaman ini juga dilakukan dalam rangka mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota cerdas untuk mendorong kemudahan layanan-layanan publik,” kata Bustami.

Setelah penandatangan nota kesepa-

haman ini, Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menjalin koordinasi dalam bentuk pertemuan berkala untuk mendiskusikan berbagai hal yang terkait dengan implementasi Gerakan Menuju 100 Smart City.

Kedua pihak juga akan melakukan sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD), baik secara bersama maupun sendiri-sendiri, kepada pemangku kepentingan sebagai upaya pelaksanaan implementasi Gerakan Menuju 100 Smart City di Banda Aceh. Program yang sama juga dilaksanakan di 25 daerah lain di Indonesia.

Menurut Bustami, Gerakan Menuju 100 Smart City dilaksanakan sejak 2017. Dimulai oleh 25 kabupaten/kota. Setahun kemudian, jumlah yang bergabung meningkat dua kali lipat. Dan tahun ini, bertambah lagi 25 kota/kabupaten, termasuk Banda Aceh.

Wali Kota Aminullah sendiri berharap penandatanganan ini berdampak baik bagi Banda Aceh dalam mempercepat pembangunan. “Atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Banda Aceh saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI atas dipilihnya Kota Banda Aceh sebagai salah satu daerah yang melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Kominfo RI tentang Gerakan Menuju 100 Smart City.”

Aminullah juga berterima kasih serta berharap dukungan berbagai elemen masyarakat hingga OPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang bersama-

sama dalam mempercepat proses pelayanan dan pembangunan. Melalui *smart city*, kata Aminullah, masyarakat akan mendapatkan pelayanan dan informasi dengan mudah dan sederhana, semua berbasis teknologi informasi.

“Hampir semua kalangan kini memanfaatkan *smartphone* dan jaringan internet dalam aktifitas sehari-hari. Fenomena inilah yang harus kita manfaatkan untuk membangun *masterplan* data yang terintegrasi dengan aplikasi yang dimiliki Pemko,” kata Aminullah.

Aminullah menegaskan agar pemanfaatan teknologi informasi ini dapat tercapai secara utuh, maka harus ada kesungguhan dari semua pemangku kepentingan. Pihaknya juga akan segera menyusun dan membentuk tim untuk membangun infrastruktur, dan menyiapkan segala elemen kerja yang diperlukan dalam implementasi *smart city* termasuk membentuk Dewan Smart City.

Dewan beranggotakan semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan pakar *smart city* dari kalangan akademisi, sebagai wadah partisipasi antarsektor dan antarelemen dalam melaksanakan percepatan pembangunan dan pelaksanaan *smart city*.

Selain itu juga akan dibentuk Tim Pelaksana Gerakan Menuju 100 Smart City yang beranggotakan perwakilan pejabat dan staf pelaksana dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang bertanggung jawab untuk menyusun dan menyelesaikan rencana induk *smart city* dan program percepatan (*quick wins*). **MAHDI ANDELA**

Menuju 100 Kota Cerdas

Selain Kota Banda Aceh, ada 24 kabupaten/Kota lainnya yang melakukan penandatanganan nota kesepahaman program Gerakan Menuju

100 Smart City. Daftar di bawah ini adalah gelombang ketiga daerah yang menandatangani nota kesepahaman tersebut.

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Kabupaten Gunung Kidul | 13. Kabupaten Situbondo |
| 2. Kabupaten Banyuwangi | 14. Kabupaten Demak |
| 3. Kota Cilegon | 15. Kota Ambon |
| 4. Kota Depok | 16. Kota Bontang |
| 5. Kota Magelang | 17. Kabupaten Klaten |
| 6. Kabupaten Slregen | 18. Kabupaten Padang Pariaman |
| 7. Kota Madiun | 19. Kabupaten Tangerang |
| 8. Kabupaten Wonosobo | 20. Kabupaten Tabalong |
| 9. Kabupaten Banjar | 21. Kota Tanjung Pinang |
| 10. Kota Balikpapan | 22. Kota Kupang |
| 11. Kota Batu | 23. Kota Jayapura |
| 12. Kabupaten Kebumen | 24. Kota Kediri |

TOTAL KOTA YANG BERGABUNG DALAM KESEPAKATAN INI, SELAMA TIGA TAHUN TERAKHIR, MENCAPAI 75 DAERAH.

Menjalin
BANDA ACEH
Gemilang
AGAMA - EKONOMI - PENDIDIKAN

PELAYANAN PUBLIK TIDAK BERES ?
Laporkan Melalui :
Suwarga
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Kota Banda Aceh

Download Sekarang Juga
GET IT ON
Google Play

H. AMINULLAH USMAN, SE, Ak, MM.
WALIKOTA BANDA ACEH

Des. H. ZAINAL ARIFIN
WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH

SUWARGA

LAPOR LIHAT LAPORAN
SARAN TENTANG APLIKASI
HIGHLIGHT

DISKOMINFOTIK

Menabuh Genderang Perang Riba

Banyak masyarakat yang belum memahami bahaya riba. Program PT Mahirah Muamalah Syariah dan Ikatan Siswa Kader Dakwah Aceh ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya berbisnis secara syari'i.

MESKI menerapkan aturan syariat Islam, di Banda Aceh masih cukup mudah ditemui produk-produk keuangan yang mengandung riba. Salah satu penyebabnya adalah minimnya edukasi terhadap masyarakat. Apalagi, masyarakat masih dengan mudah menerima "bantuan" para rentenir yang sebenarnya malah semakin memburukkan usaha mereka.

Sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai praktik ribawi di Banda Aceh, khususnya yang dilakukan oleh rentenir, PT Mahirah Muamalah Syariah (MMS) menggandeng Ikatan Siswa Kader Dakwah (Iskada) Aceh.

"Insya Allah dalam waktu dekat akan kita teken MoU-nya. Salah satu poinnya menjadikan lima gampong di Banda Aceh sebagai pilot project program kerja sama antara MMS dan Iskada untuk memerangi riba," kata Direktur Utama PT MMS T Hanansyah, Jumat awal Mei lalu.

Kemitraan antara lembaga keuangan mikro syariah milik Pemko Banda Aceh dan Iskada Aceh ini akan dituangkan dalam sebuah dokumen Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman. Bersama Iskada, kata Hanan, pihaknya akan mengadvokasi dan melakukan gerakan dakwah guna memutuskan praktik ribawi dalam



Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman menandatangi prasasti saat meresmikan beroperasinya PT. Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah Syariah (MMS)

setiap transaksi ekonomi di Banda Aceh.

"Gerakan ini harus kita mulai dari tingkat gampong sebagai ujung tombak pembangunan kota," kata Hanan. Dia optimistis ikhtiar pihaknya itu berjalan optimal. Apalagi Iskada memiliki banyak kader dakwah yang selama ini bersentuhan langsung dengan berbagai aktivitas di gampong. Langkah ini juga sebagai dukungan pemangku kepentingan untuk memberangus maksiat ekonomi.

Keberadaan rentenir, kata Hanan, masih mengintai pedagang kecil. Mereka datang ke para pedagang kecil seolah-olah membantu memudahkan urusan pedagang yang tengah mengalami kesulitan modal usaha. Namun dalam praktiknya, bantuan itu lebih sering menjerumuskan

ketimbang menolong.

Hanan menjelaskan, praktik para rentenir ini tidak hanya menebar riba, mereka juga menciptakan kemiskinan baru dan inflasi daerah. "Jadi praktik rente yang non lembaga maupun motif lembaga harus kita cegah bersama-sama."

Menurut Hanan, genderang perang terhadap rentenir ditabuh oleh Aminullah Usman sedari menjabat sebagai Wali Kota Banda Aceh. Salah satu yang digagas Aminullah adalah PT MMS ini. Bank plat merah milik Pemerintah Kota Banda Aceh itu dibentuk untuk membuka akses modal usaha bagi pengusaha mikro sesuai dengan prinsip syariah.

"Dengan begitu, pengusaha kecil kita yang masih berpendapatan rendah dapat terbebas dari jeratan rentenir.

Terlibat praktik rente itu sudah dosa, bisnis juga tentunya tidak halal dan tidak berkah," kata Hanan.

Ketua DPP Iskada Aceh Khairul Laweung menyambut baik dan mengapresiasi pelibatan pihaknya dalam program kerja sama dimaksud. "Kami sangat tertarik menjalankan misi mulia ini. Jangan beri ruang sedikit pun bagi rentenir untuk merajalela di bumi Aceh."

Iskada, kata Khairul, siap melakukan gerakan dakwah ekonomi syariah ke gampong-gampong hingga ke sekolah-sekolah, baik lewat mimbar, tulisan, dan aktivitas lainnya. Menurut dia, kampanye Banda Aceh sebagai kota bersyariat Islam akan sia-sia jika tak ada upaya pemerintah kota dan warganya untuk bebas dari jerat riba. A. SABUR

Merawat Masjid Al- Wustha, Mempertahankan Juara II Terbersih di Kota Gemilang

Masjid Jami' Al - Wustha terpilih sebagai juara II, dalam perlombaan masjid terbersih dan tertertib Se- Kota Banda Aceh, 2018 lalu. Wargapun bertekat akan terus merawat dan mempertahankan predikat tersebut.

M ESKI cuaca panas dan dalam suasana berpuasa, tak menyurutkan semangat Rahmad (50) membersihkan halaman Masjid Jami' Al-Wustha, di Dusun Rawa Sakti, Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Senin, 21 Mei 2019.

Dia terus menyapu halaman masjid, sambil sesekali mencabut rumput kecil diantara celah coran lantai dan menyingkirkan kayu-kayu kecil yang tampak berserakan.

Sambil memegang sapu lidi yang tidak bagus lagi, ia terus mengelilingi seluruh halaman masjid. Bisa saja, ia ingin memastikan, tak ada lagi sampah yang tersisa.

Setelah membersihkan seluruh halaman, Pak Rahmad, begitu namanya dipanggil, bergegas menuju tempat wudhu. Dengan sigap, menuangkan cairan pembersih dan mengepel seluruh lantai hingga kamar mandi.

Memang, kondisi halaman dan tempat wudhu hingga kamar mandi ketika itu tampak sedikit kotor. Maklum saja, dalam suasana bulan ramadhan seperti ini, masjid selalu ramai dikunjungi para jamaah melaksanakan shalat tarawih.

"Saya iklas mengerjakannya, karena saya ingin memastikan masjid ini terlihat rapi dan menarik bagi jamaah yang ingin melaksanakan shalat disini," ujar Pak Rahmad singkat.

Dilihat lebih dekat, masjid ini memang tampak bersih dan asri, baik di halaman luar, maupun di dalam masjid. Semua kitab suci Al quran tersusun rapi ditempatkan dalam rak terbuka setinggi setengah meter.

Begitu juga dengan kondisi karpet sajadah yang tampak bersih dan rapi. Kelembutannya pun membuat jamaah lama-lama ingin bertahan di dalam masjid dua lantai ini.

Selain itu, fasilitas lain yang terdapat dalam masjid adalah satu ruang pustaka yang menyimpan ratusan kitab dan koleksi buku, dan ruang untuk para khadam serta terdapat 12 AC untuk memanjakan para jamaah.

Kondisi serupa juga terlihat di luar perkarangan masjid, sepanjang parit yang mengelilingi halaman masjid tampak sangat bersih. Tak nampak sedikitpun sampah disana dan kondisi air pun mengalir tanpa

hambatan.

Selain sebagai tempat beribadah, masjid yang dibangun diatas tanah berukuran 50x 50 meter itu juga dijadikan tempat pengajian anak-anak.

Dalam suasana ramadhan, jadwal pengajiannya berupa program hafalan Al quran dimulai pada pagi hari hingga menjelang shalat dzuhur. Dan, dilanjutkan kembali hingga menjelang shalat ashar.

Kegiatan itu dipimpin oleh Agustinus Samsudin MA, yang juga sebagai Imam Masjid Jami' Al- Wustha sebagai ketua tahfid. Program ini diberikan secara gratis untuk anak-anak di gampong tersebut.

Baru-baru ini, Masjid Jami' Al Wustha juga terpilih sebagai masjid yang dikunjungi oleh Tim Safari Ramadhan Gemilang Pemko Banda Aceh yang dipimpin langsung oleh Wakil Walikota Banda Aceh, Drs. H Zainal Arifin, Selasa (14/5/2019) malam.

Turut hadir dalam rombongan, Sekdakota, Bahagia, para Staf Ahli Wali Kota, para Asisten, Serta para Kepala SKPK jajaran Pemko Banda Aceh.

Dalam kunjungan itu, Wakil Walikota juga menyerahkan sumbangan dana untuk kemakmuran masjid sebesar Rp.10 juta. Bantuan itu diterima oleh Ketua BKM Masjid Jami' Al Wustha, Tgk .H. Tajuddin Nur.

Selain itu, Zainal Arifin juga menyerahkan Al Quran, lima gulung ambal, kain sarung dan sandal wudhuk untuk masjid. Acara ditutup dengan ceramah ramadhan yang disampaikan oleh Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Banda Aceh, Tgk Bachtari Arahas.

Pada Info Banda Aceh, Tgk. H. Tajuddin Nur mengaku senang dengan kunjungan Wakil Walikota Banda Aceh, Zainal Arifin. Selain bisa bersilaturahmi dengan orang nomor dua di Kota Banda Aceh itu, juga dapat melihat secara langsung kondisi yang sedang dihadapi pengurus masjid.

Dia menceritakan. Masjid Jami' Al-Wustha Gampong Jeulingke telah dua kali secara berturut-turut memperoleh juara ke II, dalam perlombaan masjid terbersih dan tertertib Se- Kota Banda Aceh, pada 2017- 2018 lalu.

Katanya, meski dalam kondisi keuangan yang pas pasan, namun tak menyurutkan semangat warga yang menginginkan masjid ini, menjadi yang terbaik di Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh.

"Dalam menjaga kebersihan masjid, kami memberdayakan kadham-kadham untuk menata yang kurang-kurang agar terlihat rapi dan bersih. Disamping itu, kita juga melibatkan seluruh warga di Dusun Rawa Sakti, Gampong Jelingke untuk membersihkan perkarangan masjid dan lingkungan tempat tinggal warga," ungkapnya.

Tgk. H. Tajuddin Nur mengatakan, kadham yang khusus merawat dan tinggal



di masjid berjumlah empat orang. Mereka

juga diberi jerih payah sekalipun, kita tidak ada sumber dana khusus untuk mengajari para khadam yang merupakan para perantau yang sedang melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Kota Banda Aceh.

"Animo masyarakat sangat tinggi dalam berpartisipasi untuk membersihkan masjid, termasuk satu minggu hingga satu bulan sekali membersihkan halaman masjid dan lingkungan. Termasuk, menjelang ramadhan kemarin, kepala dusun mengarahkan masyarakat untuk membersihkan lingkungan termasuk halaman masjid secara berturut-turut selama dua minggu," ungkap Tgk. H. Tajuddin didampingi Kepala Dusun Rawa Sakti, H. M. Yusra.

Dia menambahkan, selama bulan ramadhan, Badan kemakmuran Masjid (BKM) juga mengadakan berbagai kegiatan. Diantaranya, pembagian kanji rumbi secara gratis bagi masyarakat.

Pembagiannya dilakukan setiap hari setelah shalat ashar untuk 100 porsi. Sementara, untuk dana pembuatan kanji rumbi itu sendiri berasal dari sumbangan warga.

Selanjutnya, diadakan kenduri nuzul quran di masjid berupa pemotongan lembu untuk memasak *kuah beulangong*. Pembiayaan untuk membeli lembu dikenakan pada seluruh KK dengan penetapan khusus. Hasil masakan *kuah beulangong* juga dibagikan pada seluruh warga.

"Untuk penyediaan kue bagi kelompok tadarus berasal dari warga juga. Tiap hari, kita telah mengatur jadwal, yaitu empat rumah menyediakan kue untuk kelompok tadarus. Dan, dua rumah menyediakan untuk berbuka puasa khadam. Itu secara bergiliran bagi seluruh warga Dusun

Rawa Sakti,"ujarnya.

Terkait dengan sejarah pembangunan masjid, Tgk. H. Tajuddin Nur menceritakan. Masjid Jami' Al-Wustha dibangun pada 1989. Awalnya atau sekitar tahun 1970an, masjid tersebut merupakan rumah warga yang diwakafkan untuk tempat melaksanakan shalat secara berjamaah.

Beberapa tahun kemudian, secara musyawarah warga disepakati membongkar rumah tersebut dan secara bertahap dilakukan pembangunan yang menjadi cikal bakal berdirinya Masjid Jami' Al Wustha.

"Pembangunan awalnya inikan dari beras segenggam dan sedekah penuh dari warga disini. Cara lain, dalam membangun masjid, kami lakukan sistem lelang kepada warga. Misal, pululan tiang yang berdiri dalam masjid ini dibangun oleh setiap warga yang memberikan sumbangan. Makanya, setiap tiang itu ada nama pemberi sedekah," ungkapnya.

"Kemudian, kalau kami butuh semen, kami tawari pada warga, siapa yang sanggup memberi. Waktu cat ini ada bantuan dari Pemko Banda Aceh. Selebihnya, dalam pembangunannya hingga megah seperti ini berasal dari sumbangan warga sekitar," ulasnya.

Seperi dalam pengadaan karpet, merupakan seluruhnya sumbangan warga. Setiap meter, pihak BKM melelang dengan besaran harga Rp. 750 ribu. InsyaAllah, warga sangat antusias, sehingga ada warga yang menyumbang hingga lima meter.

"Sikit-sikit kita buat, mulai dari lantai hingga dinding dan sebagainya. Sejak tsunami (2004) sudah kami pergunakan, walaupun di atas semen kasar. Dan, antusiasme masyarakat yang melaksanakan shalat disini cukup ramai, sampai ke Gampong Kajhu Aceh Besar. Terlebih, dalam pelaksanaan shalat lima waktu." Ungkapnya. **AZHARI USMAN**

Juara HUT Kota

Edisi kali ini, Info Kota Banda Aceh memuat tulisan juara lomba menulis tentang Banda Aceh. Kegiatan ini digelar untuk memperingati Hari Jadi Kota Banda Aceh ke 814. Salah satu dari tiga pemenang adalah Zuhri Noviandi. Tulisan ini telah dimuat di situs berita kumparan.com

Transformasi Desa di Banda Aceh, dari Kumuh hingga Instagramable

Oleh: Zuhri Noviandi*

WARNA-warni dinding mengapit lorong kecil Gampong (desa) Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh. Tanaman bunga hias tertata rapi sepanjang ruas jalan. Di sela-selanya disisipi kursi pemanis taman. Seorang wanita mengenakan kemeja flanel, menjinjing tas ransel berjalan santai.

Sesekali pandangan tampak menoleh ke kiri dan kanan, menatap lukisan ragam tema menyulut perhatian. Wanita itu mengeluarkan gawai dari saku baju, lalu berswafoto di balik salah satu dinding berlatar belakang gambar hati.

“Ini baru bagus,” ujar Fatma (27) seorang warga Banda Aceh saat sedang berkunjung ke Gampong Warna-warni.

Gampong Lhong Cut merupakan salah satu desa yang masuk dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Banda Aceh. Desa yang dulunya semrawut dan kotor, kini bersolek menjadi lokasi Instagramable.

Saat kampung tersebut disambangi beberapa waktu yang lalu, tampak kondisi lingkungan bersih dan rapi. Wajah kampung Lhong Cut kini berubah menjadi lebih modern.

Program Kotaku memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat terutama di kawasan kumuh. “Dulunya tempat ini sangat kumuh tapi sekarang disulap menjadi taman asri warna-warni,” kata Fatma.

Dengan wajah warna-warni bak pelangi tersebut, bagi Fatma, memberikan kesan semangat dan jadi lokasi menarik untuk berswafoto. Apalagi dibalut dengan ragam macam mural.

“Menurut saya lokasi seperti selain bermanfaat untuk keindahan. Juga bisa dijadikan sebagai lokasi wisata,” ujarnya.

50 Desa di Banda Aceh Disulap Menjadi Bebas Kumuh

Melalui program Kotaku, Pemerintah Kota Banda Aceh bersama Dinas Cipta Karya, telah menyulap sebanyak 50 desa menjadi desa bebas kawasan kumuh. Desa-desa ini tersebar di sejumlah wilayah Banda Aceh.

Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman mengatakan, pada 2017



pemerintah telah memoles sebanyak 15 desa. Sedangkan pada 2018 dengan anggaran senilai Rp 38,2 miliar bersumber dari APBN milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ada 35 desa yang dibuat jadi lebih baik.

“Program ini menyentuh dan bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Buktinya adalah lorong ini (Desa Lhong Cut). Dulu ada got (gorong-gorong) besar, bahkan menjadi sarang nyamuk. Sekarang sudah indah jauh dari penyakit dan bisa dinikmati oleh masyarakat,” kata Aminullah.

Aminullah mengatakan, dalam menjalankan program Kotaku pihaknya juga bekerja sama dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Anggaran yang dikucurkan ke setiap gampong dikerjakan oleh masyarakat masing-masing desa dengan sistem swakelola.

“Pemerintah hanya merekomendasikan desa-desa mana saja. Tidak ada pegang dana, sama sekali nol. Kita sudah menjalankan menurut petunjuk pusat,” ujarnya.

Aminullah menargetkan di tahun 2020 Banda Aceh akan bebas dari kawasan kumuh. “Sisanya yang masih belum ter-cover akan terus dilaksanakan. Di tahun 2020 Banda Aceh harus bebas dari kumuh,” ungkapnya.

Selain Gampong Lhong Cut, melalui program Kotaku salah satu desa di kawasan Setui yang dulunya sangat kumuh kini telah berganti wajah menjadi lokasi wisata. Dengan warna-warna serta ragam lukisan di setiap dinding rumah, kata Aminullah, akhir-akhir ini wisatawan yang datang ke Aceh kerap berkunjung ke sana.

Sementara itu, Kadis Perkim Kota Banda Aceh Jalaluddin mengungkapkan, pihaknya bersama dengan BKM, KSM dan masyarakat terus berupaya keras merealisasikan program Kotaku. Setelah sejumlah infrastruktur selesai dibangun di 35 gampong, program ini akan dilanjutkan dengan menangani sisanya kawasan kumuh yang hanya tersisa sekitar 21 hektar meliputi dua gampong.

“Total kawasan kumuh yang sudah

ditangani mencapai 773 hektare dari 794 total kawasan kumuh di Banda Aceh. Sisanya sekitar 21 hektare lagi, dan insyaallah sesuai target 2019 ini akan tuntas,” ungkapnya.

Di samping itu, Ketua BKM Amiruddin Usman Daroy menjelaskan, kriteria pemilihan desa yang dianggap kumuh, dinilai dari segi kebersihan, tata letak bangunan, drainase, limbah sampah, dan air bersih.

Kelima aspek ini benar-benar dinilai sehingga setelah itu baru ditetapkan menjadi desa yang masuk dalam kategori Kotaku. Setelah ditetapkan, penggerakan desa Bebas Kumuh ini akan dilakukan oleh masing-masing masyarakat desa yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat.

“Jadi penggerakan ini murni masyarakat setempat yang kerjakan, karena kami berpikir ingin hasil yang maksimal. Tidak mungkin masyarakat dia kerjakan dengan asal-asalan,” pungkasnya.

*Juara II Karya Jurnalistik dalam rangka Hari Jadi ke 814 Kota Banda Aceh

■ **T Novizal Aiyub, Direktur Utama PDAM Tirta Daroy ■**

Arah Baru Nakhoda Lama

T Novizal Aiyub kembali dipercaya memimpin Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy. Seremoni pelantikan pria berjanggut ini dilaksanakan oleh Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin di Balai Kota, Jumat pekan lalu. Ampon Aiyub--sapaan Novizal--akan memimpin perusahaan penyedia air bersih di Banda Aceh hingga 2024.

Penunjukan kembali Ampon Aiyub sebagai nakhoda perusahaan plat merah milik Pemerintah Kota Banda Aceh ini bukan hal mengejutkan. Selama memimpin PDAM Tirta Daroy, Ampon Aiyub terbukti membawa perubahan signifikan di perusahaan ini, terutama di bidang pelayanan. Dengan pengalamannya yang panjang, Ampon Aiyub diharapkan mampu membawa PDAM Tirta Daroy menjadi perusahaan yang bisa diandalkan masyarakat kota untuk mendapatkan layanan vital ini. Berikut wawancara Info Kota Banda Aceh terkait langkah yang akan diambilnya untuk menyempurnakan layanan air bersih di Banda Aceh.

Kembali diamanahkan menjadi Direktur Utama PDAM Tirta Daroy, apa tugas yang dibebankan kepada Anda oleh pimpinan daerah?

Kami berharap meneruskan sejumlah perbaikan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Wali kota dan wakil wali kota berharap agar cakupan layanan PDAM Tirta Daroy mampu menjangkau seluruh masyarakat Banda Aceh di seluruh pelosok. Ini tentu membutuhkan komitmen besar dari seluruh jajaran di PDAM. Saat ini, layanan sudah mencapai 94 persen. Kami berharap dapat mencapai angka 100 persen pada 2020.

Di beberapa tempat, layanan PDAM Tirta Daroy masih dirasakan kurang memuaskan. Terutama pasokan air yang minim di jam-jam tertentu?

Saat ini, kami masih berhadapan dengan sejumlah kendala untuk menghadirkan layanan yang andal. Masih banyak instalasi pipa tak layak karena dimakan usia. Sumber air baku dan kebocoran juga masih didapati. Hal ini sangat mempengaruhi pasokan air bersih ke pelanggan. Namun sedikit demi sedikit, persoalan ini akan tuntas.



Apa langkah yang akan diambil manajemen PDAM Tirta Daroy untuk mengantisipasi hal-hal tersebut?

Pemerintah Kota Banda Aceh berkomitmen membenahi layanan air bersih. Wali Kota Aminullah Usman, misalnya, mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13 miliar. Sedangkan di tahun berikutnya, pemerintah kota akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20 miliar. Uang ini akan kami gunakan untuk memperbaiki jaringan untuk menekan angka kebocoran pipa. Dari dalam, perusahaan juga terus memperbaiki sumber daya manusia agar mampu mencapai target-target yang dipatok Wali Kota Aminullah.

PDAM Tirta Daroy menyandarkan seluruh keuangan kepada anggaran kota?

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh hanya satu dari beberapa sumber keuangan yang kami butuhkan untuk meningkatkan layanan PDAM Tirta Daroy. Ke depan, pemerintah kota akan mencari sokongan keuangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Ini yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Zainal Arifin. Kami optimistis hal ini bisa tercapai.

PDAM Tirta Daroy juga bekerja sama dengan PDAM Batam?

Ya. Saat ini PDAM membangun sistem Distrik Meter Area (DMA). Sistem ini didampingi oleh PDAM Batam. Sistem ini dibangun di wilayah Darussalam. Ada progres yang menggembirakan dari penerapan sistem ini, terutama untuk menekan angka kebocoran air. Target awal hanya 12 persen. Namun

dengan DMA, PDAM Tirta Daroy mampu menekan kebocoran hingga 15 persen. Kami berharap, sistem ini dapat segera diterapkan di daerah lain di Banda Aceh.

Selama Anda menjabat, jumlah keluhan pelanggan air bersih di Banda Aceh menurun, apa yang Anda lakukan?

Ini adalah kerja bersama. PDAM Tirta Daroy adalah tim besar dengan tanggung jawab besar pula. Penurunan jumlah keluhan ini menunjukkan kepuasan pelanggan. Saat ini, misalnya, meski ada beberapa daerah yang kekurangan pasokan air, namun pelanggan masih memperoleh air bersih. Kebanyakan keluhan layanan PDAM Tirta Daroy terjadi saat pembangunan Fly Over di Simpang Surabaya dan Underpass Beurawé. Tahun lalu, jumlah keluhan menurun drastis menjadi hanya 80 kasus.

Bagaimana dengan persoalan air baku?

Air yang mengalir ke pelanggan

berasal dari Krueng Aceh. Saat musim hujan, kekeruhan air meningkat. Dan ini menjadi kendala serius terhadap produksi air bersih. Hal ini diperburuk dengan sampah yang hanyut dari hulu dan sepanjang aliran sungai. Kondisi ini menyebabkan produksi air bersih berkurang. Sebaliknya, pada musim kering, debit Krueng Aceh berkurang. Dan ini juga menjadi masalah.

Solusinya?

Mungkin kami akan mengandeng para pihak untuk membantu memelihara daerah aliran sungai Krueng Aceh. Saya berharap, pada periode ini, PDAM Tirta Daroy mampu menghasilkan terobosan yang tidak hanya memuaskan pelanggan, namun pula memastikan pasokan air dari Krueng Aceh benar-benar terjaga. Ini adalah tantangan besar, insya Allah, kami memohon doa, agar mampu melaksanakannya.

